KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Peraturan Peliputan DPR Jangan Kekang Pers
Tanggal : Selasa, 12 Februari 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

Peraturan Peliputan DPR Jangan Kekang Pers

JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak mengekang kebebasan pers dalam pembuatan peraturan peliputan pers di lingkungan DPR.

"Peraturan peliputan di mana pun memang dibutuhkan untuk mengatur agar proses peliputan dapat berjalan lancar, namun peraturan itu tidak boleh mengekang kebebasan pers. Bahkan, seharusnya peraturan dibuat untuk memudahkan akses pencarian info bagi jurnalis," kata Ketua Umum AJI Eko Maryadi, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, AJI mendukung peraturan peliputan di lembaga manapun asalkan tak menghambat tugas jurnalis untuk meliput, tidak mempersulit akses informasi bagi pers, dan tidak mengekang kebebasan pers.

"Kalau peraturan peliputan di DPR sudah 'membentur' tiga unsur tersebut maka peraturan itu harus dikritisi," ujarnya.

Dia mengaku bahwa AJI pernah diundang oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk membahas rancangan peraturan peliputan di DPR itu, akan tetapi pada waktu itu DPR mengajak dengan alasan peraturan peliputan dibuat untuk menutup akses bagi wartawan-wartawan "yang tak jelas".

Karena itu, dia menyarankan DPR sebagai lembaga publik untuk tidak membuat peraturan yang secara substansial bertentangan dengan kehendak rakyat. **(Ant)**